

Kebijakan Kependudukan

Pengantar

- ⇒ Secara makro, *core problem* kependudukan: masalah kuantitas dan masalah kualitas.
- ⇒ Masalah kuantitas: laju pertumbuhan penduduk (*population growth*), tingkat kelahiran (*fertility*), tingkat kematian (*mortality*), dan persebaran yang tidak merata (*migration*).
- ⇒ Masalah kualitas: derajat kesehatan (*health*), pendidikan (*education*), kualitas hidup, kebebasan, dan sebagainya.
- ⇒ Diperlukan kebijakan untuk mengatasi masalah kependudukan (*population policy*) .

- ⇒ Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi demografi (pertumbuhan, komposisi, distribusi dan mobilitas penduduk) ,dan dimensi sosial ekonomi, politik dan ekologi (pendidikan, kesehatan, kebebasan, kualitas hidup, ketenaga kerjaan, dan sebagainya).
- ⇒ Oleh karena itu rumusan kebijakan kependudukan harus mencakup bidang yang lebih luas dari sekedar *fertility control* → *Beyond Family Planning*

Definisi

- ⇒ Organski (1961) merumuskan kebijakan kependudukan sebagai: “ *a deliberate effort by a national government to influence the demographic variables: fertility, mortality and migration*”.
- ⇒ United Nation Ad Hoc Consultative Group of Experts on Population Policy: “ *....measures and programs designed to contribute to the achievement of economic, social, demographic, political and other collective goals through affecting critical demographic variables namely, size and growth of population, its geographic distribution (national and international) and its demographic characteristic.*”

Jenis-jenis Kebijakan Kependudukan

- ⇒ Kebijakan kependudukan dapat dilakukan secara langsung (*direct policy*) maupun secara tidak langsung (*indirect policy*) melalui pembangunan di sektor-sektor lain.
- ⇒ Isaacs et.al.: kebijakan eksplisit, dan kebijakan implisit.
- ⇒ *Kebijakan eksplisit*, adalah pernyataan atau dokumen (UU, Perpu, Perpres, Permen, dsb.) yang dibuat pemerintah pusat yang menyangkut tentang rencana untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk, dan mungkin juga distribusinya.
- ⇒ *Kebijakan implisit*, adalah hukum, peraturan, dan sejenisnya yang meskipun tidak dikeluarkan khusus untuk mempengaruhi pertumbuhan, komposisi, dan distribusi penduduk namun memiliki pengaruh terhadap hal tersebut.

Jenis-jenis.....

- ⇒ Gavin W. Jones, 1973: *population-responsive policy* (PrP). , dan *population-influencing policy* (PiP).
- ⇒ *PrP*: kebijakan yang diperlukan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengadaan pangan, ketenagakerjaan, perencanaan kota, dan sebagainya yang merupakan hasil dari tingkat fertilitas dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- ⇒ *PiP*: kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi secara langsung tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk.

Hal yang perlu diperhatikan.....!!!

Menurut Isaacs et.al. dalam merumuskan kebijakan kependudukan para perencana dan pengambil keputusan harus memperhatikan:

- ⇒ Kebijakan kependudukan biasanya dikaitkan dengan pembangunan.
- ⇒ Kebijakan kependudukan dan kebijakan pembangunan bukan merupakan duahal yang bertentangan.
- ⇒ Kebijakan kependudukan bukan lagi merupakan isu yang sensitif, dan saat ini telah umum di seluruh dunia.

Perkembangan Kebijakan Kependudukan

- ⇒ 1950-an dan 1960-an kelompok neo-Malthusian memberi perhatian khusus pada pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga berdampak pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Melalui pengembangan teknologi kontrasepsi yang lebih baik, dan program KB di seluruh dunia, maka dikempanyekan kebijakan *birth control*.
- ⇒ *World Population Conference, 1974* di Bucharest, Rumania negara-negara maju menegaskan bahwa program KB hendaknya menjadi alat utama dalam pengendalian penduduk.
- ⇒ Periode 1980-an, program KB telah meluas ke negara-negara sedang berkembang. Seiring dengan hal itu makin meluas pula kampanye tentang pentingnya suatu integrasi antara program KB dengan program-program kesehatan, dan program-program yang menyangkut kemajuan kaum perempuan (di Indonesia: *beyond family planning*)

- ⇒ *International Conference on Population and Development* (ICPD), 1994 di Kairo, Mesir, dihasilkan program aksi yang mendukung strategi baru dalam kebijakan kependudukan yang menekankan adanya keterkaitan secara integral antara penduduk dan pembangunan.
- ⇒ Salah satu pencapaian terbesar ICPD Kairo 1994, adalah adanya keinginan untuk memberdayakan perempuan baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun sebagai kunci untuk memperbaiki kualitas hidup.
- ⇒ Dengan demikian, pada akhir abad 20 telah terjadi perubahan visi dalam kebijakan kependudukan, dari fokusnya pada pengendalian variabel-variabel demografi semata menjadi kearah perbaikan kualitas hidup (terutama perempuan), dan pembangunan.

- ⇒ Menurut Sen, Germain & Chen (1994), kebijakan kependudukan saat ini perlu didukung oleh suatu pendekatan pembangunan manusia dengan kesehatan reproduksi (*health reproduction*), pemberdayaan (*empowerment*), dan hak-hak individu sebagai tujuan utama.
- ⇒ Selanjutnya dikemukakan adanya tiga hal penting dalam kaitannya dengan kebijakan kependudukan:
 - 1) Kebijakan pendidikan harus berubah, mencerminkan adanya suatu komitmen yang mendasar pada etika, dan hak azasi manusia.
 - 2) Kebijakan kependudukan yang lebih dari sekedar pengendalian fertilitas hanya efektif jika menjadi bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang lebih luas.
 - 3) Kebijakan kependudukan memiliki prioritas strategis, yaitu pemberdayaan perempuan (*women's empowerment*), dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual (*reproductive and sexual health sevices*).

⇒ ICPD Kairo 1994 juga merumuskan rencana aksi (*plan of action*) yang merekomendasikan beberapa kegiatan, yang antara lain bertujuan untuk:

- 1) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berlanjut dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pendidikan, khususnya bagi anak-anak perempuan.
- 3) Memperjuangkan kesetaraan gender (*gender equality*).
- 4) Menurunkan angka kematian bayi dan anak, serta kematian ibu.
- 5) Memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi , termasuk KB, dan kesehatan seksual.